

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini telah menerapkan sistem desentralisasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah sebagai bentuk dari pelaksanaan otonomi daerah yaitu menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Kebijakan Pemerintah yang lebih dikenal dengan Sistem Otonomi Daerah ini memberikan hak dan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur semua urusan rumah tangganya masing-masing seperti memilih pemiimpin daerah, memungut pajak dan retribusi daerah, mengelola keuangan daerah serta memanfaatkan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di setiap daerahnya dan mendapatkan sumber pendapatan lain-lain yang sah.

Sistem Otonomi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi:”Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” yang telah di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah menjelaskan bahwa pemerintahan daerah berhak dan berkewajiban melaksanakan rumah tangga sendiri sesuai dengan yang dibutuhkan dan juga memperlihatkan keuangan yang adil, proporsional, transparan serta mempertimbangkan keadaan daerah yang tidak lepas dari asas desentralisasi.

Sistem otonomi daerah yang telah diterapkan oleh Pemerintahan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban sehingga tercapailah *good governance*. Selain itu Pemerintah Daerah dapat lebih leluasa untuk mengembangkan kemampuan atau kekayaan daerahnya masing-masing sehingga

hal tersebut tidak membatasi upaya dari setiap daerah untuk meningkatkan pendapatannya. Namun dengan adanya sistem otonomi daerah ini Pemerintah Pusat tetap mengawasi kinerja atau kegiatan pemerintah daerah baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga sistem perekonomian Indonesia tetap berjalan dengan baik.

Pemerintah Daerah diharapkan dapat lebih berhati-hati dan teliti dalam mengelola keuangannya sendiri seperti melakukan pencatatan penerimaan kas daerah maupun pengeluaran kas daerah. Kas merupakan aset pemerintahan paling lancar (liquid) dan aktif. Kas disebut sebagai aset lancar paling aktif karena semua transaksi keuangan pemerintah pada umumnya akan berhubungan dengan penerimaan atau pengeluaran kas. Penerimaan kas daerah berupa pendapatan atau penerimaan pembiayaan atau penerimaan transfer yang menjadi sumber dana untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah. Penerimaan Kas Daerah dari Pendapatan Asli Daerah beberapa diantaranya diperoleh dari Retribusi Daerah.

Pencatatan penerimaan kas terdapat di bagian Bendahara Penerimaan pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pendapatan Asli Daerah untuk Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ialah Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah akan dicatat sesuai dengan nominal yang tertera pada bukti Surat Tanda Setoran. Pencatatan STS ini kemudian akan menghasilkan SPJ (Laporan Pertanggungjawaban) yang selanjutnya akan dievaluasi dibagian akuntansi yang hasil akhirnya berupa laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk menyusun Tugas Akhir ini dengan judul **“Sistem Penerimaan Kas Pendapatan Retribusi Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.”**

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah diklasifikasikan menjadi 3 jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Kedua yaitu Retribusi Daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah dari keuntungan/laba bersih perusahaan daerah untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah baik perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan yang terakhir adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, merupakan Pendapatan Asli Daerah antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

Dari keempat jenis Pendapatan Asli Daerah, maka TA ini dibatasi dengan membahas Sistem Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah tentang Pendapatan Retribusi Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Penulis akan membahas sistem penerimaan kas pendapatan retribusi daerah pada SETDA Provinsi Jawa Tengah yang meliputi: alur penerimaan pendapatan retribusi daerah, fungsi yang terkait, dokumen dan catatan yang diikut sertakan dalam sistem penerimaan pendapatan retribusi daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan dan kegunaan Tugas Akhir ini bagi penulis, pihak Sekretariat Daerah Provinsi Jawa tengah, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dan para pembaca laporan ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sistem penerimaan kas pendapatan asli daerah retribusi daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- b. Membandingkan antara teori-teori Akuntansi Keuangan Daerah yang telah di peroleh dengan kegiatan di lapangan sehingga memperoleh pengetahuan dan pengalaman.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Kegunaan penulisan bagi pihak-pihak yang diharapkan adalah:

- a. Bagi Penulis
Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan akan sistem penerimaan kas pendapatan asli daerah dan dapat dijadikan pembelajaran serta pengalaman sebelum memasuki dunia kerja sehingga kelak dapat menerapkan metode yang tepat di lingkungan kerja.
- b. Bagi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sarana informasi dan masukan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyempurnakan Sistem Penerimaan Kas Pendapatan Retribusi Daerah.
- c. Bagi Program DIII Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sarana informasi atau referensi dalam melakukan penelitian dan hasil dari peningkatan kualitas kelulusan.
- d. Bagi Masyarakat
Penulisan ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi atau tambahan wawasan mengenai sistem penerimaan kas pendapatan asli daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Data

Jenis data dan metode yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1.4.1 Jenis Data

Jenis data menurut cara perolehannya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Data Primer
Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari obyek penelitian yang didapatkan melalui proses wawancara dengan orang yang

berada di tempat penelitian. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis tidak menggunakan sumber data primer.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari obyek penelitian. Data sekunder dalam penulisan Tugas Akhir ini berupa data mengenai sejarah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dasar hukum, tugas pokok dan fungsi, visi dan misi, tujuan, struktur organisasi SETDA, tugas dan wewenang dari masing-masing biro.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan yaitu baik data primer maupun data sekunder atau melalui proses wawancara, observasi/pengamatan, maupun studi pustaka. Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Observasi/pengamatan

Menurut Nawawi dan Martini (1991), metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Dalam penulisan Tugas Akhir ini dilakukan beberapa pengamatan secara langsung mengenai pencocokan SPJ dengan bukti penerimaan pada pencatatan penerimaan kas daerah di Bagian Akuntansi Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

b. Metode Wawancara

Menurut Prabowo (1996), metode wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden. Dalam Tugas Akhir ini dilakukan wawancara secara tatap muka dengan pegawai bagian akuntansi biro keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan informasi mengenai evaluasi atau pencocokan antara SPJ dengan bukti penerimaan kas. Data yang diperoleh berupa alur penerimaan kas hingga sampai pelaporan keuangan.

c. Metode Kepustakaan

Metode kepustakaan adalah metode pengumpulan data melalui membaca dari beberapa buku sehingga diperoleh kesimpulan dalam memperkuat pemahaman penulis, atau melalui pengutipan. Dalam penulisan Tugas Akhir ini data dikumpulkan melalui berbagai buku dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penerimaan kas pendapatan retribusi daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Tugas Akhir ini disusun menjadi empat bagian, secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bagian ini akan diuraikan mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan, cara pengumpulan data, serta sistematika secara garis besar mengenai penyusunan Tugas Akhir.

BAB II GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas sejarah, dasa hukum, tugas pokok dan fungsi, visi dan misi, tujuan, strktur organisasi, serta tugas dan wewenang dari masing-masing biro dan bagian di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan tentang pengertian sistem dan prosedur, pengertian kas, pengertian sistem informasi akuntansi, penegertian sistem akuntansi penerimaan kas, fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas pendapatan retribusi, dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas retribusi, catatan akuntansi yang

digunakan dalam sistem penerimaan kas pendapatan retribusi, jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas pada bendahara penerimaan, dan bagan alir/ *flowchart* dari sistem penerimaan kas pendapatan retribusi.

BAB IV PENUTUP

Berisi ringkasan atas pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab III tentang Sistem Penerimaan Kas Pendapatan Retribusi Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.